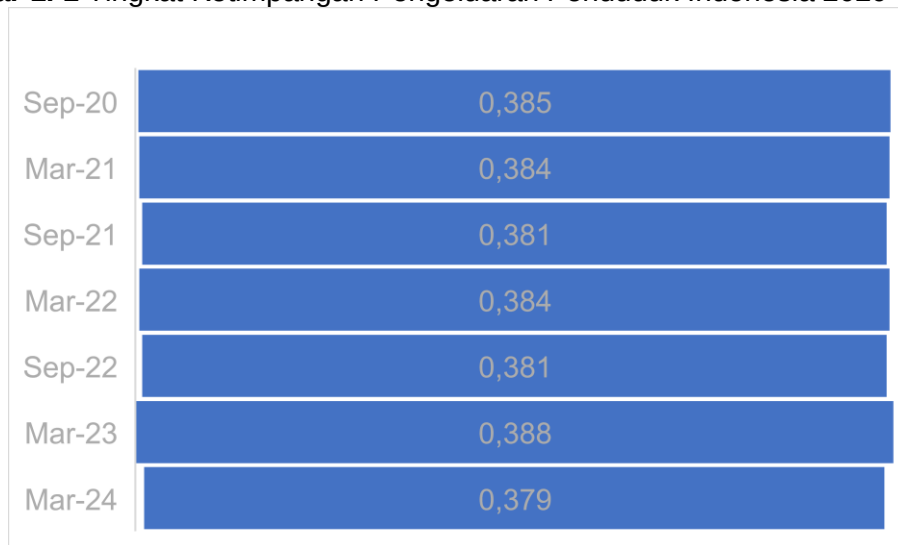


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketimpangan dalam pertumbuhan daerah merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan dan perekonomian daerah, dan tetap menjadi tantangan besar di berbagai negara berkembang. Dalam konteksnya, tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya meningkatkan nilai produksi dalam negeri, tetapi juga membentuk penyebaran kekayaan yang lebih adil di seluruh daerah. Namun pada kenyataannya, proses pembangunan sering kali menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata, di mana aktivitas ekonomi lebih berkembang di daerah-daerah yang memiliki sumber daya, infrastruktur, dan akses pasar yang lebih baik. Kejadian ini menyebabkan munculnya beberapa pusat perekonomian yang tumbuh sangat cepat, sedangkan daerah-daerah lainnya hanya mengalami perkembangan yang lebih perlahan. Ketidakmerataan tersebut terlihat dari perbedaan antar daerah dalam pendapatan, kualitas pendidikan, peluang pekerjaan, tingkat investasi, serta ketersediaan layanan publik. Dari sudut pandang teori pembangunan regional, situasi ini menunjukkan ketidaktahuan dalam proses perubahan struktur ekonomi, faktor penyebaran produksi, serta kemampuan wilayah dalam memanfaatkan peluang pembangunan. Jika ketimpangan pembangunan terus terjadi tanpa adanya kebijakan yang tepat, maka akan muncul berbagai dampak buruk, seperti meningkatnya orang yang berpindah dari daerah kurang berkembang ke daerah yang lebih maju, tekanan sosial dan ekonomi semakin besar di kota, serta hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang maksimal (Asriati *et al.*, 2023).

Pembangunan daerah masih menjadi topik utama dalam pembangunan ekonomi nasional dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak yang terlibat. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berjalan positif dan stabil dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di berbagai daerah belum merata, sehingga menyebabkan kesenjangan antar wilayah masih terus berlangsung (Asriati *et al.*, 2023). Perbedaan ini terasa jelas antara provinsi dan kabupaten/kota dalam hal kontribusi terhadap perekonomian, tingkat kemiskinan, kualitas infrastruktur, serta peluang kerja, yang menunjukkan ketidakmerataan dalam akses dan peluang untuk berkembang (Thahir *et al.*, 2021). Wilayah yang memiliki dasar industri yang kuat, sistem transportasi yang memadai, dan investasi yang banyak cenderung tumbuh lebih pesat dibandingkan wilayah yang masih bergantung pada sektor primer dengan hasil produksi yang rendah (Simanjuntak & Widodo, 2025). Fenomena ini sesuai dengan teori ekonomi regional, yang mengatakan bahwa terbentuknya kluster ekonomi dan dampaknya terhadap wilayah lain menyebabkan perbedaan waktu dalam proses penyamaan tingkat pembangunan antar daerah (Kurnia, 2021). Selain itu, perbedaan kapasitas keuangan di setiap daerah serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal juga mempengaruhi tingkat pembangunan yang berbeda di setiap wilayah (Sari *et al.*, 2025).

Gambar 1. 1 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa koefisien Gini, yang mengukur ketidakmerataan pendapatan di antara rumah tangga Indonesia, berada di angka 0,379 per Maret 2024. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Maret 2023 (0,388) dan September 2022 (0,381). Penurunan ini menunjukkan peningkatan dalam cara rumah tangga membelanjakan uang di seluruh negeri, meskipun ketidakmerataan masih dianggap moderat. Dalam ekonomi berkembang, koefisien Gini seperti ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diimbangi dengan distribusi kekayaan yang merata, artinya beberapa kelompok masyarakat masih menerima bagian pengeluaran yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Dengan kata lain, meskipun tren ketidakmerataan menurun, struktur distribusi ekonomi masih menunjukkan ketidakmerataan yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan kebijakan pembangunan. Jika ditinjau dari wilayah tempat tinggal menunjukkan cara orang menghabiskan uang yang berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pada bulan Maret 2024, nilai koefisien Gini di daerah

perkotaan adalah 0,399, yang lebih besar dibandingkan nilai di daerah pedesaan yang sebesar 0,306. Meskipun kedua daerah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat keterlibatan pedesaan masih cukup besar. Ketimpangan yang besar di kawasan perkotaan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, peluang kerja, dan tingkat pendapatan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok orang tertentu. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kota-kota biasanya menarik investasi, industri, dan tenaga kerja yang berpengalaman. Namun hal ini juga menyebabkan ketimpangan pendapatan karena perbedaan kualifikasi, tingkat pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sebaliknya, daerah yang biasanya menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang lebih rendah karena struktur ekonominya lebih seragam, meskipun nilai kekayaannya mungkin tidak lebih besar dari kota.

Selain itu, menurut ukuran ketidakmerataan yang diukur oleh Bank Dunia, persentase pengeluaran 40 persen penduduk terbawah di Indonesia adalah 18,40 persen. Pangsa ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki posisi ekonomi rendah masih menghabiskan persentase pengeluaran yang relatif kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Ketidakadilan ini semakin terlihat ketika dilihat dari daerahnya: 40 persen penduduk miskin di kota hanya menghabiskan 17,41 persen dari total pengeluaran, sedangkan di pedesaan persentasenya adalah 21,39 persen. Data ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah lebih terasa di kota-kota, menunjukkan adanya perbedaan ekonomi yang signifikan antara daerah tempat tinggal penduduk yang letaknya tinggi dan rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi masih belum bisa menciptakan kebahagiaan dan manfaat ekonomi yang komprehensif, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Fenomena ini

menunjukkan bahwa ketimpangan perekonomian di Indonesia tidak hanya terjadi karena perbedaan pendapatan antar orang, tetapi juga karena adanya ketimpangan dalam pembangunan di berbagai wilayah. Perbedaan dalam mendapatkan akses pendidikan, peluang kerja, dan penyaluran investasi di berbagai wilayah dapat memperbesar perbedaan ekonomi, baik antara daerah perkotaan dan pedesaan, maupun antar kabupaten atau kota.

Ketimpangan dalam pembangunan daerah adalah salah satu masalah struktural yang sering dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Haryono & Ramlah, 2024). Perbedaan ini terjadi karena perbedaan kemampuan antar daerah dalam membangun perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pada pembangunan daerah, adanya pekerjaan yang tersedia menjadi tanda penting, karena berhubungan langsung dengan cara pendapatan yang didistribusikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika peluang kerja tidak merata di berbagai wilayah, perbedaan tingkat kemiskinan bisa membuat kesenjangan pembangunan antar daerah semakin luas. Situasi ini menunjukkan bahwa strategi pasar tenaga kerja berperan penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Nisa *et.al* 2025). Tingkat kemiskinan terbuka (OPR) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar jumlah orang yang bekerja atau mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat OPR di suatu daerah, semakin rendahnya kemampuan daerah tersebut untuk mempekerjakan pekerja yang produktif, yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan penduduk dan memperluas wilayah yang tidak berkembang (Azahra, 2025). Kemiskinan yang masih tinggi biasanya terjadi karena tidak seimbangnya jumlah pekerja dengan jumlah pekerjaan yang tersedia, serta kemampuan pekerja

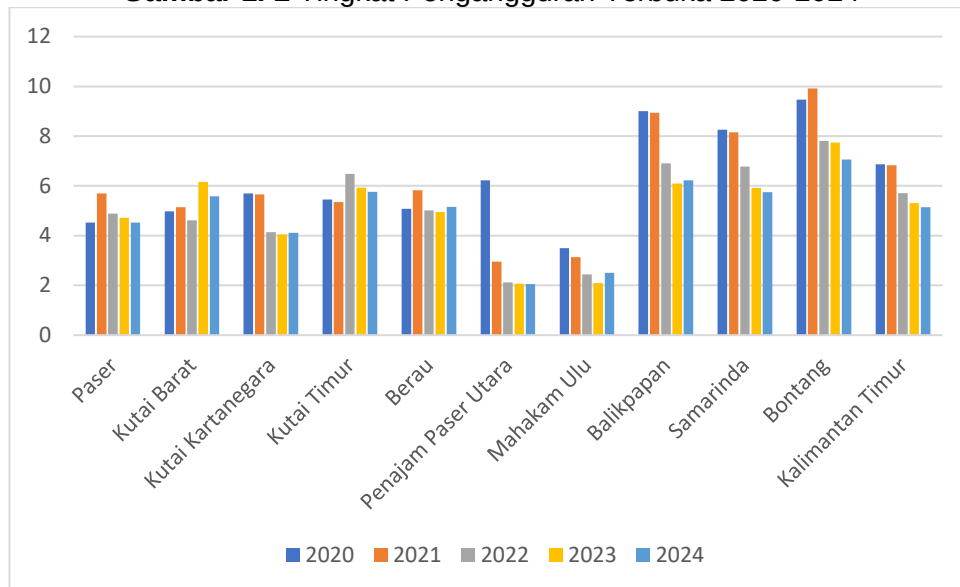
untuk berpindah dari satu sektor ekonomi ke sektor lainnya yang rendah. Situasi ini bisa menghalangi pembangunan yang tidak merata, karena daerah yang mempunyai kemiskinan banyak biasanya tumbuh ekonominya lebih lambat dibandingkan daerah yang mempunyai banyak pekerja (Rahayu, 2023).

Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata dan memiliki ciri khas tersendiri, karena struktur ekonomi daerah tersebut sangat bergantung pada sektor sumber daya seperti pertambangan dan energi. Berarti pekerjaan yang dihasilkan tidak selalu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Akibatnya, beberapa kabupaten/kota yang mengandalkan ekonomi non-ekstraktif cenderung memiliki peluang kerja yang sedikit, sehingga menyebabkan ketimpangan tingkat kemiskinan di berbagai daerah. Perbedaan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja dapat menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan daerah, terutama jika daerah yang miskin tidak dapat meningkatkan kinerja tenaga kerjanya (Rahayu, 2023).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan yang penting dengan kemiskinan dan pembangunan daerah. Penelitian di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan penting terhadap perbedaan antar daerah, artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, semakin besar perbedaan pembangunan antar kabupaten atau kota (Prasetya & Sumanto, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja bukan hanya menunjukkan tingkat kemakmuran tetapi juga menjadi faktor penting dalam perbedaan kesejahteraan antar daerah. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa tingkat intensitas terbuka merupakan salah satu analisis variabel makro yang sering digunakan dalam memahami kondisi daerah karena mampu menunjukkan sejauh mana

sumber daya manusia dimanfaatkan. Wilayah yang memiliki banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan biasanya memiliki kemampuan menghasilkan ekonomi yang rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan wilayah tersebut untuk bersaing secara negatif. Pada akhirnya, ketidakadilan dalam kesempatan kerja di berbagai wilayah dapat menyebabkan perbedaan yang lebih besar dalam pendapatan, infrastruktur, dan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka bukan hanya menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja, namun juga menjadi pertanda penting dalam menilai apakah pembangunan daerah itu inklusif dan berhasil (Rahayu, 2023).

Lebih lanjut, tingkat pengangguran terbuka justru meningkat meskipun jumlah usia kerja penduduk menurun, menunjukkan bahwa beberapa orang yang sebelumnya bekerja mungkin kini kembali tidak memiliki pekerjaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan tenaga kerja di Kalimantan Timur masih bergantung pada perubahan kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Jika kondisi ini terus berlangsung, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kerentanan sosial ekonomi bagi masyarakat, seperti turunnya pendapatan keluarga, naiknya tingkat kemiskinan, serta menurunnya kemampuan membeli barang dan jasa. Kemiskinan yang masih tinggi bisa menunjukkan bahwa perubahan besar dalam struktur perekonomian daerah belum berjalan cukup baik dalam menciptakan pekerjaan yang berkualitas dan bisa lestari. Ketergantungan pada beberapa sektor tertentu dapat membuat pasar tenaga kerja sulit menyesuaikan diri saat permintaan pekerja di sektor-sektor itu berubah (Rahayu, 2023).

Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan data tahun 2020-2024, TPT di kabupaten/kota di Kalimantan Timur menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada beberapa daerah. Kota seperti Bontang dan Balikpapan memiliki tingkat TPT yang relatif tinggi dibanding daerah lain, misalnya Bontang yang mencapai sekitar 9,46% pada tahun 2020 dan masih berada di kisaran 7% pada tahun 2024. Sementara itu, daerah seperti Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu menunjukkan TPT yang lebih rendah, bahkan mengalami penurunan signifikan hingga berada di kisaran 2-3% pada periode akhir. Secara umum, terjadi penurunan TPT setelah tahun 2021 di sebagian besar wilayah, yang mengindikasikan adanya pemulihan kondisi ketenagakerjaan. Namun, perbedaan antar daerah masih terlihat jelas, mencerminkan ketimpangan dalam kesempatan kerja dan struktur ekonomi antar kabupaten/kota.

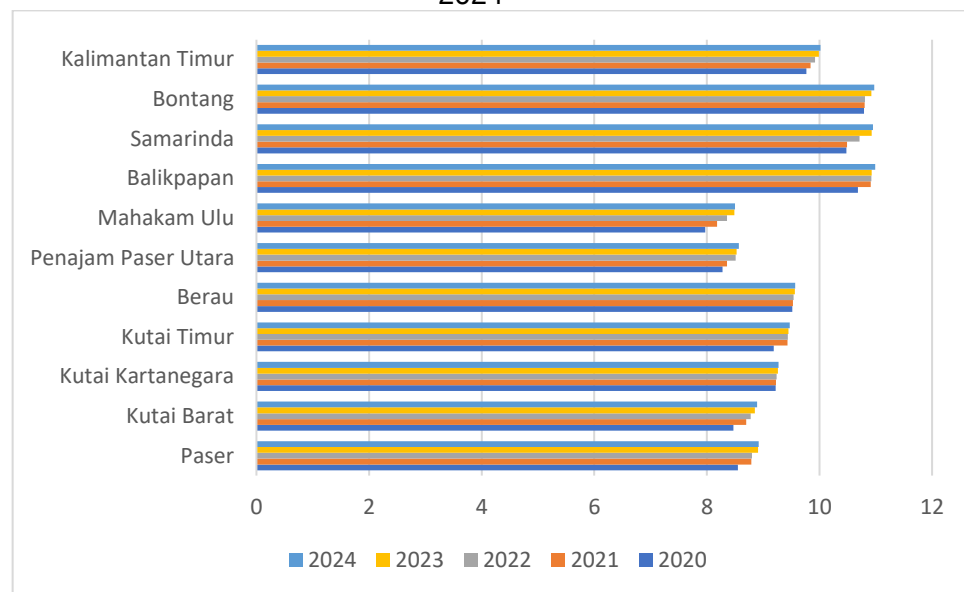
Pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari pemerataan hasil pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota merupakan fenomena yang

terus mendapat perhatian dalam kajian ekonomi regional, karena ketimpangan yang tinggi berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan peluang yang tidak merata bagi masyarakat di daerah tertentu (Zasriati, 2020). Pendidikan merupakan bagian penting dalam membangun manusia, karena membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja, efisiensi kerja, serta kesempatan untuk bergerak dalam hal sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam pembangunan daerah, pendidikan juga menjadi alat untuk menciptakan kesetaraan, karena membantu masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi modern (Vega *et al.*, 2024).

Pendidikan adalah salah satu bentuk investasi manusia (human capital investment) yang memiliki efek jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan (Poai *et al.*, 2025). Teori human capital menyatakan bahwa peningkatan pendidikan akan meningkatkan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja, sehingga berdampak positif terhadap kesempatan kerja, pendapatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketimpangan dalam capaian pendidikan berpotensi memperluas jurang ketidaksetaraan antarwilayah, karena wilayah yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih mudah menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja dibandingkan wilayah dengan pendidikan rendah (Arifin, 2023). Salah satu dimensi penting dalam pembangunan adalah pendidikan, yang sering diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah (RLS). RLS mencerminkan lamanya pendidikan formal yang ditempuh oleh penduduk, dan secara langsung berkaitan dengan kualitas modal manusia (human capital) yang menjadi dasar peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Lubis *et al.*, 2025).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan karakter pembangunan wilayah yang heterogen. Perkembangan RLS di tingkat kabupaten/kota memperlihatkan variasi yang signifikan dalam capaian pendidikan setiap daerah. Kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda memiliki RLS yang relatif tinggi, sedangkan daerah dengan struktur geografis yang terpencil cenderung memiliki RLS yang lebih rendah. Pola disparitas ini mencerminkan ketidakmerataan pembangunan pendidikan yang kemudian berkorelasi dengan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi tersebut (Rasnino *et al.*, 2022).

Gambar 1. 3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024



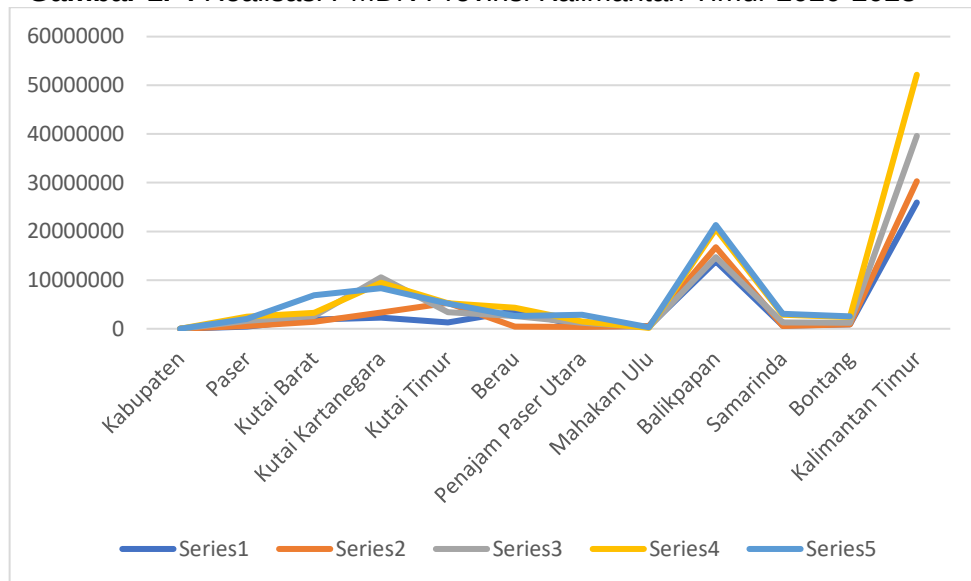
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Data RLS tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kota-kota besar seperti Balikpapan, Samarinda, dan Bontang memiliki RLS yang lebih tinggi, dengan nilai mendekati atau bahkan melebihi 10 tahun pada tahun 2024, yang menunjukkan rata-rata penduduk telah menempuh pendidikan hingga jenjang SMA. Sebaliknya, daerah

seperti Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara memiliki RLS yang lebih rendah, meskipun tetap mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Secara keseluruhan, peningkatan RLS ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan. Namun, kesenjangan antar wilayah masih terlihat, yang mengindikasikan belum meratanya pembangunan di sektor pendidikan di seluruh kabupaten/kota.

Investasi merupakan hal penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat sistem produksi di wilayah tersebut. Dalam pembangunan daerah, investasi berperan sebagai sarana membentuk modal yang membantu menciptakan kemampuan produksi baru, memperluas peluang kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Ridwan *et al.*, 2025). Oleh karena itu, pergerakan investasi, terutama investasi dari dalam negeri (PMDN), menjadi tanda penting untuk mengukur ketertinggalan pembangunan ekonomi daerah. Di tingkat nasional, peran investasi dalam negeri semakin penting karena pemerintah berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor - sektor riil dan industri-industri yang ada di bagian bawah. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mempercepat investasi, seperti mempercepat proses perizinan, mereformasi peraturan, dan meningkatkan iklim bisnis, bertujuan untuk mendorong investasi dari pengusaha dalam negeri di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang memiliki banyak sumber daya alam, seperti Kalimantan Timur. Dalam konteks ini, investasi domestik tidak hanya menjadi sumber dana untuk mendanai pembangunan, tetapi juga mendorong perubahan struktur perekonomian daerah menuju sektor yang lebih efektif dan menghasilkan lebih banyak nilai (Mansyur *et al.*, 2021).

Di Kalimantan Timur, realisasi investasi dari warga negara Indonesia menunjukkan tren yang mengalami perubahan naik turun, tetapi secara umum terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kantor Koordinasi Investasi, investasi dalam negeri di provinsi ini umumnya berfokus pada bidang pertambangan, manufaktur, konstruksi, dan perdagangan. Peningkatan realisasi investasi dari dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir sangat berkaitan dengan peran penting Kalimantan Timur sebagai pusat pembangunan nasional, terutama sejak ditetapkannya lokasi ibu kota baru, yang telah mendorong bertambahnya kegiatan investasi di bidang infrastruktur serta sektor pendukung lainnya. Namun penyebaran investasi di antara kabupaten dan kota di provinsi ini masih sangat tidak seimbang, dimana sebagian besar investasi berada di daerah yang memiliki infrastruktur lebih baik dan industri yang lebih berkembang. Konsentrasi investasi ini dapat menghambat perkembangan daerah-daerah lain jika tidak diperbaiki dengan cara mendistribusikan investasi secara lebih adil. Wilayah yang mendapat investasi besar biasanya tumbuh ekonominya lebih cepat, pendapatan masyarakat lebih tinggi, dan fasilitas infrastruktur lebih baik. Daerah yang memiliki investasi sedikit permulaan ketinggalan dalam perkembangan ekonominya, sehingga membuat daerah tersebut menjadi lemah (Hasanah, 2023).

Gambar 1. 4 Realisasi PMDN Provinsi Kalimantan Timur 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Grafik PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2023 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam realisasi investasi antar wilayah. Kota Balikpapan terlihat mendominasi dengan nilai investasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan konsentrasi aktivitas ekonomi dan daya tarik investasi yang lebih kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, beberapa daerah seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Timur juga mengalami fluktuasi dengan tren peningkatan yang cukup signifikan pada periode tertentu, namun belum mampu menyamai tingkat investasi di Balikpapan. Di sisi lain, wilayah seperti Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara menunjukkan nilai investasi yang relatif lebih rendah dan cenderung tidak stabil, mencerminkan masih terbatasnya pemerataan investasi di daerah tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi investasi antar kabupaten/kota, yang berpotensi memengaruhi kesenjangan pembangunan wilayah.

Fenomena empiris di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota masih terjadi meskipun berbagai indikator pembangunan ekonomi mengalami perbaikan. Peningkatan investasi, khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pertumbuhan rata-rata lama sekolah (RLS), serta dinamika ketenagakerjaan yang relatif membaik belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan pembangunan wilayah. Ketimpangan masih terlihat dari adanya perbedaan tingkat pendapatan, kualitas sumber daya manusia, serta konsentrasi aktivitas ekonomi yang cenderung terpusat di wilayah perkotaan dan daerah berbasis industri ekstraktif (Ramadhani, 2025). Fenomena tersebut tidak sejalan dengan Teori Ketimpangan Pembangunan Williamson, yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan pembangunan ekonomi akan diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan antar wilayah melalui proses difusi pembangunan. Dalam kerangka teori ini, setelah mencapai titik tertentu, pertumbuhan ekonomi seharusnya mendorong pemerataan melalui penyebaran investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta berkembangnya aktivitas ekonomi di wilayah yang sebelumnya tertinggal. Namun, kondisi di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa peningkatan indikator pembangunan belum diikuti dengan penurunan ketimpangan secara signifikan.

Meskipun telah terdapat beberapa penelitian mengenai ketimpangan pembangunan wilayah yang menganalisis pengaruh ketenagakerjaan, pendidikan, dan investasi, namun masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena tersebut di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara ketiga indikator penting tersebut secara simultan dalam memengaruhi

ketimpangan pembangunan wilayah. Padahal, ketenagakerjaan, pendidikan, dan investasi merupakan faktor utama yang saling berkaitan dan berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota.

Karena adanya kesenjangan penelitian tersebut, studi ini menjadi sangat penting dalam kajian ekonomi pembangunan, khususnya dalam memahami dinamika ketimpangan pembangunan wilayah di daerah berkembang. Dalam teori pembangunan ekonomi, proses transformasi struktural yang ditandai dengan pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah. Namun, dalam praktiknya, proses tersebut tidak selalu berjalan secara seimbang dan seringkali justru menimbulkan ketimpangan, terutama apabila tidak diikuti dengan distribusi sumber daya yang merata. Di Provinsi Kalimantan Timur, perkembangan sektor unggulan seperti pertambangan dan industri ekstraktif menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Namun demikian, kondisi ini tidak selalu diikuti dengan pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota. Tanpa pengelolaan yang tepat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan wilayah, terutama apabila investasi, kesempatan kerja, dan kualitas pendidikan lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan dapat muncul sebagai konsekuensi dari proses pembangunan yang tidak inklusif.

Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini terletak pada upaya penelitian ini untuk memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana interaksi antara ketenagakerjaan, pendidikan, dan investasi memengaruhi ketimpangan

pembangunan wilayah. Analisis ini menjadi dasar penting dalam memahami apakah proses pembangunan yang terjadi telah berjalan secara merata atau justru memperkuat disparitas antar daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam mengkaji relevansi teori ketimpangan pembangunan wilayah, tetapi juga berperan sebagai alat analisis bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut secara ilmiah agar penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis. Adapun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur?
2. Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur?
3. Apakah penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur?
4. Apakah tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun sebagai pedoman untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang jelas dan terarah sesuai dengan fokus penelitian.

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur
2. Untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur
3. Untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan penanaman modal dalam negeri terhadap ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian pembangunan daerah dengan melihat cara lapangan kerja, tingkat pendidikan, dan investasi dari dalam negeri membawa pengaruh terhadap perbedaan tingkat kesejahteraan antar kabupaten atau kota di Kalimantan Timur. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi apakah peningkatan kualitas pekerjaan melalui pendidikan dan investasi bisa membantu mengurangi ketimpangan, atau justru apakah kekuatan faktor produksi tertentu, seperti sektor pertambangan, menghambat kesetaraan pendapatan. Temuan ini bertujuan untuk memperjelas cara mekanisme pembangunan mempengaruhi penyebaran

kesejahteraan serta bagaimana kondisi lokal mempengaruhi hubungan antara keduanya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dengan memberikan saran kebijakan yang jelas bagi pemerintah daerah serta para pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kalimantan Timur. Hasilnya bisa membantu menyusun strategi pembagian investasi yang lebih merata antar kabupaten dan kota, merancang program untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta menentukan tindakan pendidikan yang secara langsung berdampak pada pengurangan ketimpangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi alat untuk mengalirkan kinerja investasi dan tenaga kerja, sehingga bupati atau wakil gubernur dapat mengalokasikan anggaran daerah dengan lebih tepat.

c. Manfaat Bagi Pengembangan Lembaga Pendidikan Universitas Bojonegoro

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat strategis bagi Pengembangan Lembaga Pendidikan Universitas Bojonegoro dengan memperkuat relevansi kurikulum program studi Ekonomi, Perencanaan Wilayah, dan Kebijakan Publik melalui pemahaman mendalam tentang hubungan antara ketenagakerjaan, pendidikan, dan investasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Hasilnya dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan mata kuliah berbasis riset kebijakan regional, meningkatkan kapasitas peneliti kampus, serta membuka peluang kolaborasi penelitian dengan pemerintah daerah, BPS, dan sektor swasta. Universitas Bojonegoro juga dapat meningkatkan reputasi akademik melalui publikasi dan presentasi hasil penelitian, serta memanfaatkan

temuan sebagai landasan PKM dan program pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, distribusi investasi, dan perencanaan infrastruktur daerah. Secara praktis, metode analitik data panel yang digunakan bisa diadaptasi untuk studi komparatif di Bojonegoro maupun daerah lain, memperkuat posisi Universitas Bojonegoro sebagai pusat kajian kebijakan regional di Jawa Timur.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terarah, sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memberikan hasil yang maksimal serta untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan, perlu dilakukan beberapa pembatasan. Adapun batasan masalah yang digunakan yaitu:

1. Penelitian dilakukan hanya di Provinsi Kalimantan Timur dan Penelitian ini tidak memasukkan Kabupaten Mahakam Ulu dalam analisis karena keterbatasan data pada periode awal penelitian.
2. Variabel yang dianalisis terbatas yaitu ketenagakerjaan, pendidikan, dan investasi, yang berfungsi sebagai variabel independen, sedangkan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah menjadi variabel dependen. Batasan ini berarti bahwa variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi ketimpangan, seperti faktor fiskal daerah, kualitas institusi, atau variabel demografi selain angkatan kerja, belum menjadi perhatian utama. Hal ini dilakukan agar tetap fokus, meskipun kemungkinan ada variabel lain yang mempengaruhi atau menghalangi hasil, dan perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya.
3. Data yang digunakan adalah jenis data panel berupa deret waktu dengan karakteristik longitudinal per kabupaten/kota, meliputi periode (2015-2024). Batasan ini mengatur mengenai risiko terkait kualitas dan konsistensi data dari

tahun ke tahun, perbedaan dalam resolusi atau cara pengumpulan data dari sumber yang berbeda, serta kemungkinan hilangnya data yang perlu ditangani secara jujur dan terbuka. Ketergantungan pada panel data berarti hasilnya biasanya dipengaruhi oleh variasi waktu dan perbedaan antar daerah yang terjadi pada periode tersebut.

4. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan analisis kuantitatif deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai karakteristik dan perkembangan setiap variabel penelitian selama periode pengamatan.